



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Pelaksanaan Pilkada 2024 Diuji ke MK

Jakarta, 10 Januari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Senin (10/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 67/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Bartolomeus Mirip sebagai Pemohon 1 dan Makbul Mubarak sebagai Pemohon 2. Para Pemohon merupakan Calon Bupati pada daerah Intan Jaya dan Tolitoli. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

UU 10/2016:

- **Pasal 201 ayat (7):** *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”;*
- **Pasal 201 ayat (8):** *“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.*

Pemohon 1 menjelaskan kerugiannya yang harus menunggu selama tujuh (7) tahun lamanya apabila pemilihan kepala daerah (pilkada) diundur pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan Pemohon 1 merupakan Calon Bupati Intan Jaya pada tahun 2017. Sedangkan bagi Pemohon 2, dirinya merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada tahun 2020, dirinya merasa dirugikan akibat rentang masa jabatan hanya selama empat (4) tahun yang seharusnya selama lima (5) tahun. Menurut Para Pemohon seyogyanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bukanlah pemilihan yang harus dilakukan secara nasional atau harus serentak sehingga memotong masa jabatan dan memundurkan waktu pemilihan.

Selain itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pemilihan yang harus dilaksanakan secara periodik setiap lima (5) tahun sekali. Sehingga apabila dilakukan pemotongan masa jabatan dan mengundurkan waktu berpotensi mengurangi kualitas demokrasi. Hal ini bisa berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun sehingga harus menjabat sampai dengan Tahun 2025 atau 5 (lima) tahun sejak dilantik serta pemilu serentak lokal dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan”. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)